

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa

“ Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat ”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 15) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Nomor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

- 23) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri A);
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 6 Seri A);
- 25) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012;
- 26) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah menjabarkan Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertambangan dan Energi untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2014.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 adalah sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

1.4. Sistematika Penyusunan SKPD

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014;

1.2. LANDASAN HUKUM

Mencantumkan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);

1.4. SISTEMATIKAN PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjelaskan kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD)

tahun lalu dan realisasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan;

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menggambarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan;

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menjelaskan koordinasi dan sinergis program, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, serta isu-isu penting lainnya;

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Menjelaskan perbandingan antara rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Menggambarkan hasil kajian program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari pelaksanaan musrembang Kabupaten/Kota jika sudah dilaksanakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menggambarkan tentang perumusan dan sasaran di dasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Menggambarkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan, rumusan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta tabel program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2013

Pada tahun 2013, Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan anggaran di APBD Induk sebesar Rp. 11.499.557.143.49 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.363.089.343.49 sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 6.136.467.800,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2013,

Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi menjadi Rp. 10.934.665.289,00 (mengalami pengurangan sebesar Rp. 564.891.854.49) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.195.967.489,00 yang terdiri dari gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 2.938.473.489,00 dengan realisasi keuangan sebesar 99,86% dan realisasi fisik sebesar 100% dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp. 2.257.494.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 86,48% dan realisasi fisik sebesar 100%. Untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.738.697.800,00 yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Realisasi fisik mencapai 93,54% dan realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4.897.546.860,00 atau 85,34%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 841.150.940,00 atau 14,66%.

Tabel 2.1.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertambangan dan Energi dan Pencapaian Renstra Dinas Pertambangan dan Energi
Tahun 2012 - 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			8	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2012	
				5	6	7		9	10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Target Renja SKPD Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI									
Program :									
Belanja Tidak Langsung									
Kegiatan :									
1) Gaji dan Tunjangan	1) Jumlah PNS yang menerima gaji tiap bulan		100%	66 orang	66 orang	100%	100%	-	-
2) Tambahan Penghasilan PNS	2) Jumlah PNS yang menerima tambahan penghasilan tiap bulan		100%	66 orang	66 orang	100%	100%	-	-

BELANJA LANGSUNG

1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			8	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2012	
				5	6	7		9	10
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Keluaran (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2012-2017	Target Renja SKPD Tahun 2013	Realisasi Renja SKPD Tahun 2013	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2014)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2014)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN RUTIN									
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI									
Program :									
Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Kegiatan :									
1) Penyediaan Jasa Surat menyurat	(1) Jumlah pengiriman surat tiap bulan		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(2) Jumlah pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang lancar selama 12 bulan		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(3) Jumlah laporan administrasi keuangan tiap bulan		100%	3 lap	3 lap	100%	3 lap	-	-

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	(4) Jumlah gedung kantor yang dirawat setiap bulan.		100%	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	-	-
5) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	(5) Jumlah ATK yang tersedia tiap bulan		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(6) Jumlah Barang cetak yang tersedia tiap bulan		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	(7) Jumlah komponen listrik yang baik tiap bulan		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(8) Jumlah surat kabar dan peraturan tiap tahun		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
9) Penyediaan Makanan dan Minuman	(9) Jumlah makanan dan snack yang tersedia tiap tahun		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	(10) Jumlah koordinasi luar daerah tiap tahun		100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	-	-
11) Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Administrasi Perkantoran	(11) Jumlah pegawai pengelola administrasi perkantoran tiap bulan		100%	3 orang	3 orang	100%	3 orang	-	-

Program :									
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Kegiatan :									
(1) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	(1) Jumlah kendaraan dinas yang dirawat tiap bulan		100%	7 unit	7 unit	100%	7 unit	-	-
(2) Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor	(2) Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat tiap tahun		100%	43 unit	43 unit	100%	43 unit	-	-
(3) Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor	(3) Jumlah bangunan gedung kantor yang direhab		100%	1 bangunan	1 bangunan	100%	-	-	-
(4) Pengadaan Peralatan Geologi dan Listrik	(4) Jumlah peralatan geologi dan listrik		100%	30 unit	30 unit	100%	-	-	-
Program :									
Peningkatan Disiplin Aparatur									
Kegiatan :									
(1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	(1) Jumlah pakaian dinas pegawai		100%	5 pakaian	5 pakaian	100%	80 pakaian	-	-
Program :									
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
Kegiatan :									
(1) Pendidikan dan Pelatihan Formal	(1) Jumlah pegawai yang mengikuti diklat		100%	10 orang	11 orang	100%	10 orang	-	-
(2) Sinkronisasi implementasi program pertambangan dan energi	(2) Jumlah kegiatan Sinkronisasi		100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	-	-

Program :									
Pembinaan dan Pengembangan bidang Ketenagalistrikan									
Kegiatan :									
1) Pembangunan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan tenaga surya	(1) Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU)	1000 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	130 Unit	-	-
2) Pengadaan dan Pemasangan Sparepart PLTS	(2) Jumlah Sparepart PLTS	5 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	-	-
3) Pengembangan dan Penggantian Sparepart PLTS Terpusat	(3) Tersedianya penerangan di daerah terpencil	-	100%	60 rumah	60 rumah	100%	-	-	-
Program :									
Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi									
Kegiatan :									
(1) Pemantauan Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(1) Jumlah bantuan LPG 3 Kg	200.000 paket	90.000 paket	100.000 paket	90.000 paket	90%	100.000 paket	-	-
(2) Fasilitasi Kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM	(2) Peningkatan jumlah lifting MIGAS	30 Miliar	16.07 Miliar	6 Miliar	7,20 Miliar	100%	6 Miliar	-	-

Program :									
Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah									
Kegiatan :									
(1) Kajian Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pada Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kab/Kota	(1) Jumlah laporan NPA pada CAT			1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	-	-
(2) Survey Pemetaan Sumber Daya Mineral Non Timah	(2) Jumlah laporan Potensi Sumber Daya Mineral Non Timah			1 laporan	0 laporan	0%	-	-	-
Program :									
Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah									
Kegiatan :									
(1) Penyebaran Data dan Informasi Bidang Pertambangan dan Energi yang Berkualitas	(1) Jumlah kegiatan pameran		100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	3 kegiatan	-	-
(2) Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang dan Inspektur Listrik	(2) Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan Inspektur tambang dan Inspektur listrik		100%	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	-	-
(3) Sosialisasi PERDA Mineral dan PERDA Listrik di Provinsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	(3) Jumlah sosialisasi PERDA		100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-	-	-

(4) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pertambangan dan Energi	(4) Jumlah laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah		100%	4 laporan	4 laporan	100%	4 Laporan	100%	-
--	--	--	------	-----------	-----------	------	-----------	------	---

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian merupakan target kinerja yang diharapkan dan menjadi tolak ukur dalam rangka pencapaian Visi pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diharapkan hingga tahun 2013.

Indikator yang digambarkan ini merupakan indikator yang dapat diukur dan dikuantitatifkan. Pada tahun 2013, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan 8 (delapan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan.

Outcome yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain, terlaksananya administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan yang baik dan lancar, meningkatnya kualitas dan keterampilan sumber daya aparatur, terlaksananya program/kegiatan di bidang pertambangan yang baik dan sinergis menuju *good mining practice* dan terlaksananya program/kegiatan di bidang energi dalam rangka memenuhi kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp. 1.080.470.000,00, sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 1.202.470.000,00 sehingga mengalami penambahan sebesar Rp. 122.000.000,00. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp. 1.143.599.040,00 atau sebesar 95,10% dengan sisa pagu dana sebesar Rp. 58.870.960,00 atau sebesar 4,90%.

Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah terlaksananya pelayanan perkantoran Dinas Pertambangan dan Energi yang memadai dan lancar selama 12 bulan.

Tabel 2.2
Indikator Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Indikator capaian	2013
1.	Terkirimnya surat-menyurat dinas setiap bulan	12 bulan
2.	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang lancar setiap bulan	12 bulan
3.	Tersedianya jasa administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan
4.	Tersedianya jasa kebersihan kantor setiap bulan	12 bulan
5.	Tersedianya ATK dinas setiap bulan	12 bulan
6.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap bulan	12 bulan
7.	Tersedianya komponen instalasi listrik setiap bulan	12 bulan
8.	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan setiap bulan	12 bulan
9.	Tersedianya makan dan minum rapat setiap bulan	12 bulan
10.	Terselenggaranya koordinasi luar daerah setiap bulan	12 bulan
11.	Tersedianya jasa penunjang pengelolaan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp.880.060.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp.361.990.000,00 sehingga mengalami pengurangan sebesar Rp.518.070.000,00 Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.308.814.700,00 atau sebesar 85,31% dengan sisa pagu dana sebesar Rp.53.175.300,00 atau sebesar 14,69%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah tersedianya fasilitas kantor sebagai sarana dan prasarana yang dapat

menunjang kelancaran kerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.3
Indikator Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	-
2.	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat setiap tahun	7 unit kendaraan
3.	Jumlah peralatan kantor yang dirawat setiap bulan	43 unit, 1 LS dan 1 jaringan
4.	Jumlah bangunan kantor yang direhab	1 bangunan
5.	Jumlah peralatan geologi dan listrik yang bertambah tiap tahun	30 unit
6.	Jumlah DED perencanaan pembangunan gedung kantor	-

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat indikator capaian kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur secara umum sudah mencapai target yang telah ditetapkan, tetapi untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional dan kegiatan Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor (DED gedung kantor) belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2013 dihapus karena keterbatasan anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dengan mempertimbangkan program kegiatan yang bersifat prioritas di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp. 11.370.000,00, sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 11.370.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp. 10.166.500,00 atau sebesar 89,42% dengan sisa pagu dana sebesar Rp. 1.203.500,00 atau sebesar 10,58%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur adalah tersedianya Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pejabat eselon III yang dapat menunjang pegawai dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan perkantoran yang baik dan lancar.

Tabel 2.4

Indikator Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk pejabat eselon III	5 pakaian

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp.176.900.000,00, sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 176.900.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp. 151.224.400,00 atau sebesar 85,49% dengan sisa pagu dana sebesar Rp. 25.675.600,00 atau sebesar 14,51%.

Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja PNS serta terjalinnya hubungan dan kerjasama yang sinergis antara Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota.

Tabel 2.5
Indikator Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah PNS yang mengikuti diklat	10 orang
2.	Jumlah kegiatan sinkronisasi implementasi program Pertambangan dan Energi setiap tahun	1 kegiatan

V. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp.2.541.024.800,00 sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp.2.541.024.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan Rp.2.426.314.800,00 atau sebesar 95,49% dengan sisa pagu dana sebesar Rp.114.710.000,00 atau sebesar 4,51%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan adalah tersedianya listrik di daerah terpencil yang belum dialiri listrik PT. PLN Persero menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) sehingga berjalannya sistem ketenagalistrikan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.6
Indikator Capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan Tenaga Surya	100 unit
2.	Jumlah paket pergantian <i>spare part</i> PLTS (accu dan lampu)	1 paket
3.	Jumlah rumah yang teraliri listrik dari PLTS Tepusat	60 rumah

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp.355.533.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp.355.533.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 95% dan realisasi keuangan Rp.328.460.000,00 atau sebesar 92,39% dengan sisa pagu dana sebesar Rp.27.072.080,00 atau sebesar 7,61%. *Outcome* yang dihasilkan dari terlaksananya Program

Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi adalah terlaksananya konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg dan terlaksananya perhitungan lifting Minyak Bumi serta berperan aktif dalam kegiatan Forum Keanggotaan Daerah Penghasil Minyak (FKDPM) sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari dana Bagi Hasil (DBH) Migas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.7
Indikator Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah paket konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg	90.000 paket
2.	Peningkatan lifting Migas dan DBH Minyak	Rp. 7,20 miliar

VII. Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp. 507.720.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 507.720.000,00 sehingga tidak mengalami perubahan dengan realisasi fisik mencapai 0 % dan realisasi keuangan Rp. 30.870.000,00 atau sebesar 6,08% dengan sisa pagu dana sebesar Rp. 476.849.500,00 atau sebesar 93,92%.

Outcome yang dihasilkan dari Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah adalah tersedianya data Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang dapat digunakan untuk menentukan pajak air tanah dan tersedianya peta potensi sumber daya mineral non timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.8
Indikator Capaian Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah

No	Indikator capaian	2013
1.	Tersedianya data NPA pada CAT	-
2.	Tersedianya data potensi Sumber Daya Mineral Non Timah	-

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadi gagal lelang sebanyak 3 kali dan pada sisa waktu pelaksanaan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan lelang selanjutnya.

VIII. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah pada APBD Induk Tahun 2013 sebesar Rp. 583.390.000,00 sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 581.690.000,00 sehingga mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.700.000,00 dengan realisasi fisik mencapai 100 % dan realisasi keuangan Rp. 498.096.000,00 atau sebesar 85,63% dengan sisa pagu dana sebesar Rp. 83.594.000,00 atau sebesar 14,37%.

Outcome yang dihasilkan dari Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah adalah tersedianya data dan informasi potensi sumber daya mineral dan informasi peraturan dan kebijakan serta pengawasan kegiatan pertambangan dan energi sehingga berjalannya kegiatan *good mining practice* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.9
Indikator Capaian Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

No	Indikator capaian	2013
1.	Jumlah kegiatan pameran	2 kegiatan
2.	Jumlah laporan monev inspektur tambang dan inspektur listrik	8 laporan
3.	Jumlah sosialisasi PERDA	1 kegiatan
4.	Jumlah laporan Monev bidang pertambangan dan energi	4 laporan

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Pembangunan pembangkit listrik masih menjadi kewenangan pemerintah pusat
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi dan kurangnya fasilitas operasional yang mendukung, yang berdampak kepada lambannya pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Tata ruang wilayah belum ditetapkan sehingga belum jelasnya tata ruang di masing-masing sektor khususnya sektor pertambangan.
4. Adanya benturan kewenangan dengan kehutanan baik hutan produksi maupun hutan lindung meskipun kawasan hutan ditentukan setelah keluarnya Kuasa Pertambangan (KP)/Izin Usaha Pertambangan (IUP).
5. Belum jelasnya zonasi laut serta kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penambangan.
7. Masih maraknya kegiatan penambangan rakyat yang beroperasi tanpa izin baik di kawasan hutan maupun di areal yang sudah direklamasi.
8. Rasio Elektrifikasi masih rendah sebesar $\pm 73.9\%$ dan jaringan listrik serta pembangkit listrik yang terbatas.
9. Energi baru dan terbarukan belum dikembangkan secara terpadu baik untuk wilayah pesisir, terpencil dan pulau-pulau kecil, disamping itu juga potensi Energi Baru Terbarukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat sedikit.
10. Industri turunan dari sektor pertambangan belum berkembang dengan baik sehingga belum memberikan nilai tambah bagi daerah.
11. Bagi hasil sektor pertambangan belum berpihak pada daerah penghasil.
12. Masih terjadinya tumpang tindih Peraturan Perundang-undangan sektor pertambangan dengan sektor lain.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas telah dilakukan :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar dilakukan penambahan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat baik yang diselenggarakan di daerah maupun di luar daerah dan menambah jumlah fasilitas operasional yang dapat mendukung berjalannya program/kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Melakukan koordinasi dan pemahaman mengenai batasan – batasan WUP, WPN dan WPR dengan Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat untuk menetapkan tata ruang wilayah khususnya sektor Pertambangan dan Energi.

4. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kehutanan mengenai kawasan hutan lindung dan produksi dengan wilayah pertambangan.
5. Bekerjasama dengan instansi terkait guna menerapkan zonasi laut untuk kawasan perikanan/tangkap dan kawasan wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan terhadap pelaku tambang baik di darat maupun di laut.
7. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan rakyat tanpa izin yang beroperasi di areal yang sudah direklamasi dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dari kegiatan penambangan di Wilayah Kabupaten/Kota.
8. Bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna menambah jaringan listrik dan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Melakukan penelitian, pengembangan dan data inventaris energi baru dan terbarukan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk, investor dan pelaku tambang untuk berinvestasi di industri turunan sektor pertambangan sehingga dapat menambah nilai tambah bagi daerah.
11. Mendorong PT. Timah (Persero) Tbk dan pelaku tambang lainnya untuk menyepakati besarnya royalty bagi daerah penghasil tambang.
12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait mengenai Peraturan Perundangan-undangan di sektor pertambangan dan sektor lain.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tabel 3.1
Isu Strategis Daerah terhadap Kebijakan Nasional

No.	Isu Strategis Daerah	Prioritas Nasional
A.	Energi	
1.	<p><u>Isu :</u> Krisis Listrik di daerah / pulau terpencil</p> <p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit listrik yang dimiliki PLN sudah tua dan berbahan bakar solar (PLTD) - Beban pemakaian listrik konsumen semakin meningkat - Belum optimalnya pembangkit listrik baru 	<p>Prioritas Nasional 8 : Energi</p>
2.	<p><u>Isu :</u> Studi kelayakan PLTN</p> <p><u>Keterangan :</u> Pro kontra di masyarakat tentang kegiatan studi kelayakan serta rencana pembangunan PLTN di Pulau Bangka</p>	<p>Prioritas Nasional 8 : Energi</p>
3.	<p><u>Isu :</u> PLTU 2 x 30 MW di Air Anyir Kab. Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kab. Belitung</p> <p><u>Keterangan :</u> Belum beroperasinya PLTU 2 x 30 MW di Air Anyir Kab. Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kab. Belitung karena beberapa faktor yaitu masalah pendanaan dan SDM.</p>	<p>Prioritas Nasional 8 : Energi</p>

No.	Isu Strategis Daerah	Prioritas Nasional
B. MIGAS		
1.	<u>Isu :</u> Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg <u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kejelasan dari pemerintah pusat tentang jumlah paket konversi MITAN ke LPG 3 Kg dan kapan kegiatan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan kembali. - Banyak nya masyarakat yang masih ragu /takut untuk beralih menggunakan LPG 3 Kg 	Prioritas Nasional 8 : Energi
2.	<u>Isu :</u> Kelangkaan BBM <u>Keterangan :</u> Maraknya penyalahgunaan BBM terutama jenis solar bersubsidi	Prioritas Nasional 8 : Energi
3.	<u>Isu :</u> Kelangkaan Gas <u>Keterangan :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Stok gas LPG di Depot Pulau Layang Palembang terbatas, sedangkan permintaan masyarakat tinggi - Adanya agen/sub agen yang mempermainkan harga LPG 12 Kg 	Prioritas Nasional 8 : Energi
C. Pertambangan Umum		
1.	<u>Isu :</u> Good mining practice <u>Keterangan :</u> Sistem penambangan yang baik dan benar dalam segala aspek	

No.	Isu Strategis Daerah	Prioritas Nasional
2.	<p><u>Isu :</u> WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat)</p> <p><u>Keterangan :</u> Perlu diadakan terobosan agar Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat di Daerah diberi pelimpahan kewenangan dalam menentukan kriteria, norma, prosedur, standar WPR dan IPR sesuai dengan kondisi geologis, geografis, system penambangan serta mengikutsertakan kearifan local, sehingga WPR dan IPR yang diterbitkan pemerintah Kabupaten/Kota tidak menjadi permasalahan</p>	
3.	<p><u>Isu :</u> Tambang Ilegal</p> <p><u>Keterangan :</u> Perlu diadakan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait.</p>	
4.	<p><u>Isu :</u> Pemanfaatan Mineral ikutan Timah</p> <p><u>Keterangan :</u> Optimalisasi konservasi mineral ikutan dan penambangan industri hilir semua mineral bahan galian beserta mineral ikutannya.</p>	

No.	Isu Strategis Daerah	Prioritas Nasional
5.	<p><u>Isu :</u> Tenaga kerja pada IUP (Izin Usaha Pertambangan)</p> <p><u>Keterangan :</u> Pemegang IUP diwajibkan mengutamakan tenaga kerja local/nasional terutama pada KIP (Kapal Isap Pertambangan) dengan pola optimalisasi transfer teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Lokal/Nasional.</p>	
6.	<p><u>Isu :</u> Sosialisasi Peraturan-peraturan di Bidang Pertambangan</p> <p><u>Keterangan :</u> Rapat koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pemegang IUP, IUPK dan IPR untuk menyampaikan dan menjelaskan peraturan-peraturan di bidang pertambangan</p>	

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung

Tujuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 dijabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis dan indicator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran	Indikator
<p>Tujuan 1 : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</p>	
<p>Sasaran Strategis1 : Terjuwudnya SDM aparatur yang professional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah PNS yang mengikuti diklat di Badan Diklat ESDM 2) Jumlah penyampaian laporan APBD yang tepat waktu 3) Jumlah penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tepat
<p>Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik</p>	
<p>Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran yang baik dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang baik 2) Jumlah kendaraan dinas yang beroperasi dengan baik 3) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
<p>Tujuan 3 : Mewujudkan ketersediaan data dan terwujudnya sistem informasi manajemen yang terintegrasi, akurat dan valid terkait dengan bidang pertambangan umum, sumber daya mineral & geologi, kelistrikan dan MIGAS</p>	
<p>Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya sisten informasi manajemen yang terintegrasi, akurat dan valid terkait dengan bidang pertambangan umum, lingkungan hidup, kelistrikan dan MIGAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) di luar daerah 2) Jumlah perangkat e-informasi

Sasaran	Indikator
<p>Tujuan 4 :</p> <p>Terwujudnya kelistrikan yang merata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	
<p>Sasaran Strategis 4 :</p> <p>Tersedianya listrik di daerah dan pulau terpencil yang belum teraliri listrik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2) Jumlah spare part PLTS 3) Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) dan sarana umum menggunakan tenaga surya
<p>Tujuan 5 :</p> <p>Optimalnya koordinasi dan konsultasi di bidang Pertambangan Umum, Lingkungan Hidup di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan Pemerintah Pusat</p>	
<p>Sasaran Strategis 5 :</p> <p>Terlaksananya program Pertambangan dan Energi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwawasan lingkungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kegiatan koordinasi teknis minyak dan gas bumi dengan pemerintah pusat dan daerah 2) Jumlah peserta sinkronisasi program pertambangan dan energy 3) Persentase monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkualitas di bidang Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4) Jumlah KK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015 dan Perkiraan Maju Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pengiriman surat-surat kantor setiap bulan	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	15.180.000	APBD	-	100%	15.600.000
2.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	130.500.000	APBD	-	100%	120.000.000
3.	Penyedia Jasa administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan daerah	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17 orang	138.480.000	APBD	-	17 orang	135.000.000
4.	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang bersih dan aman	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 gedung	275.400.000	APBD	-	4 gedung	275.400.000
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase ATK yang terpenuhi tiap bulan	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	182.261.000	APBD	-	100%	188.261.000

6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan tiap bulan	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	60.000.000	APBD	-	100%	65.000.000
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tersedianya komponen instalasi listrik yang memadai	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	6.325.000	APBD	-	100%	6.500.000
8.	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya informasi yang aktual	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100%	38.500.000	APBD	-	100%	40.000.000
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1780 kotak makanan dan snack	38.500.000	APBD	-	1800 kotak makanan dan snack	39.000.000
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan	650.000.000	APBD	-	12 bulan	700.000.000
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
11.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang bertambah	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit mobil dan 5 unit motor	686.500.000	APBD	-	-	-
12.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dirawat selama 12 bulan	Distamben Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12 unit kendaraan	277.980.000	APBD	-	12 unit kendaraan	300.000.000

13.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dirawat setiap bulan	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 unit APAR, 1 LS, 1 Jaringan, 4 paket peralatan kantor	25.000.000	APBD	-	6 unit APAR, 1 LS, 1 Jaringan, 4 paket peralatan kantor	25.000.000
14.	Pengadaan Peralatan Geologi	Jumlah peralatan geologi yang bertambah	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit	275.000.000	APBD	Pengadaan peralatan geolistrik	-	-
15.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 gedung	100.000.000	APBD	-	-	-
16.	Penyusunan DED gedung kantor	Jumlah laporan DED gedung kantor	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 laporan	75.000.000	APBD	-	-	-
17.	Penambahan dan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang bertambah	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	APBD	Pembangunan laboratorium, Ruangan Inspektur, Ruangan Arsip, Gudang, Mushola, Rumah jaga	6 gedung kantor	1.000.000.000
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
18.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakain dinas yang bertambah	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	-	-	APBD	-	90 pakaian	45.000.000

IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
19.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	15 orang	110.000.000	APBD	-	15 Orang	115.000.000
20.	Sinkronisasi Implementasi Program Pertambangan dan Energi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kegiatan Sinkronisasi	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 kegiatan	170.000.000	APBD	-	2 Kegiatan	175.000.000
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
21.	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7 laporan	75.000.000	APBD	-	7 laporan	75.000.000
22.	Inventarisasi Aset Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan aset yang terinventarisasi	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 laporan	150.000.000	APBD	-	1 laporan	150.000.000
VI.	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan								
23.	Pengawasan, pembinaan dan penertiban Izin Usaha Pertambangan	Jumlah laporan pengawasan, pembinaan dan penertiban dibidang pertambangan	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 laporan per Triwulan	150.000.000	APBD	-	4 laporan per triwulan	150.000.000

VII.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan								
24.	Pembangunan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan EBT di Provi. Kep. Bangka Belitung	Jumlah Penerangan Jalan Umum	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	200 unit	4.100.000.000	APBD	-	200 Unit	4.150.000.000
25.	Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pembangunan PLTS Terpusat	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2 unit	4.050.000.000	APBD	-	2 unit	4.100.000.000
26.	Pengadaan dan Pemasangan Sparepart PLTS	Jumlah paket sparepart PLTS	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 paket	300.000.000	APBD	-	1 paket	350.000.000
27.	Bimtek Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTS	Jumlah peserta BIMTEK PLTS	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 operator	175.000.000	APBD	-	20 operator	180.000.000
28.	Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Listrik	Jumlah laporan pengawasan inspektur listrik	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 laporan per triwulan	150.000.000	APBD	-	4 laporan per triwulan	150.000.000
29.	Penyusunan PERGUB Ketenagalistrikan	Jumlah PERGUB yang disusun	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 PERGUB	75.000.000	APBD	-	-	-

VIII Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi									
30.	Pemantauan Kegiatan Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah paket konversi MITAN ke LPG 3 Kg	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	100.000 paket	150.000.000	APBD	-	-	-
31.	Fasilitasi Kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM	Peningkatan DBH bidang MIGAS	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Miliar	200.000.000	APBD	Forum Keanggotaan Daerah Penghasil Minyak (FKDPM)	6 Miliar	250.000.000
32.	Seminar Potensi MIGAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah kegiatan seminar	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Kegiatan	275.000.000	APBD	Cadangan minyak Babel sudah menipis	-	-
IX. Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah									
33.	Penyusunan Potensi Geowisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan potensi Geowisata	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 laporan	150.000.000	APBD	-	-	-
34.	Survey Geolistrik untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer bawah permukaan	Jumlah laporan lapisan akuifer bawah permukaan	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 laporan	100.000.000	APBD	-	1 laporan	125.000.000

35.	Pengeboran dan Pembangunan Fasilitas Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah pembangunan sumur bor	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 titik	675.000.000	APBD	-	20 titik	675.000.000
X	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah								
36.	Penyebaran Data dan Informasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah kegiatan penyebaran data potensi Sumber Daya Mineral melalui kegiatan pameran	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3 kegiatan pameran	175.00.000	APBD	-	3 kegiatan pameran	180.000.000
37.	Pengawasan dan Pembinaan Inspektur Tambang	Jumlah laporan pengawasan dan pembinaan inspektur tambang	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 laporan per triwulan	150.000.000	APBD	-	4 laporan per triwulan	150.000.000
38.	Rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pertambangan dan Energi se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan Monev	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4 laporan per triwulan	250.000.000	APBD	-	4 laporan per triwulan	250.000.000

BAB IV

PENUTUP

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah terutama dalam rangka mendukung perekonomian daerah, Terwujudnya pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertambangan dan energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait.

Dalam mendukung pembangunan daerah, Dinas Pertambangan dan Energi telah menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dimana penyusunan dokumen tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahunan.

Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran Visi dan Misi serta arahan kebijakan pembangunan Provinsi agar lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi dasar dan tolak ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.